



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang
Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect*
terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)

Skripsi

Oleh

Muhammad Reyhan Raharjo Putra

2014330169

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang
Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect*
terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)**

Skripsi

Oleh

Muhammad Reyhan Raharjo Putra

2014330169

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph. D

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Muhammad Reyhan Raharjo Putra
Nomor Pokok : 2014330169
Judul : Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect* terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Rabu, 25 Juli 2018 dan dinyatakan

LULUS


Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Sekretaris
Mangadar Situmorang, Ph. D.

: 

Anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP. , M. A. :



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reyhan Raharjo Putra

NPM : 2014330169

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect* terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis, sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Agustus 2018



Muhammad Reyhan Raharjo Putra

ABSTRAK

Nama : Muhammad Reyhan Raharjo Putra

NPM : 2014330169

Judul : Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect* terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dari skripsi ini, yaitu “Apa saja faktor yang mendorong Inggris untuk melakukan intervensi kemanusiaan terkait perang saudara di Sierra Leone?” Pertanyaan tersebut dijawab menggunakan teori *English School*, yang didukung dengan *foreign policy analysis*, serta konsep *responsibility to protect* (R2P). Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik internal yang kerap dilakukan oleh berbagai aktor. Salah satu kasus konflik internal yang disertai oleh intervensi kemanusiaan adalah perang saudara di Sierra Leone.

Keterlibatan Inggris dalam konflik di Sierra Leone merupakan sebuah bentuk intervensi kemanusiaan. Inggris memutuskan untuk melakukan intervensi setelah *Revolutionary United Front* (RUF) menyandera 500 orang pada tahun 2000. Upaya intervensi tersebut kemudian dinamakan Operasi Palliser. Keputusan untuk melakukan intervensi merupakan hasil perhitungan atas faktor internal (determinan domestik) dan eksternal (determinan internasional) yang terjadi pada saat itu. Determinan domestik mencakup *moderately stable determinants* seperti budaya politik, dinamika politik serta *unstable determinants* seperti isu-isu yang mempengaruhi sikap negara. Lalu, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi negara melakukan *supportive actions*, serta *neutral actions* sebagai respon atas situasi internasional yang dialami.

Selain itu, keputusan Inggris juga dipengaruhi oleh tanggung jawab nasional, internasional, dan kemanusiaan. Atas beberapa tanggung jawab tersebut, Inggris harus memperhatikan kerangka R2P sebagai kerangka yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Selain merujuk pada R2P, keberhasilan Inggris melakukan intervensi terlihat dari persepsi warga Sierra Leone yang menganggap Inggris sebagai penyelamat mereka hingga akhirnya Tony Blair mendapat gelar pelopor perdamaian oleh suku Mahera, Sierra Leone.

Kata Kunci: Intervensi kemanusiaan, R2P, determinan, komunitas internasional

ABSTRACT

Name: Muhammad Reyhan Raharjo Putra

NPM: 2014330169

Title: *Humanitarian Intervention: Driving Factors on the United Kingdom Responsibility to Protect Policy in Sierra Leone Civil War (1991-2002)*

This study aims to answer the research question of this thesis, which is "What are the factors that push the British to do humanitarian intervention related to civil war in Sierra Leone?" The research question is answered by using English School theory, supported by the concept of foreign policy analysis and Responsibility to Protect (R2P). Humanitarian intervention can be implemented to resolve internal conflicts, and it is done by various actors. One of internal conflict cases that was followed by humanitarian intervention is the civil war in Sierra Leone.

British involvement in Sierra Leone civil war was a form of humanitarian intervention. British decided to intervene after Revolutionary United Front (RUF) took 500 hostages in 2000. The intervention effort was later named the Palliser Operation. The decision to intervene was the result of the calculation of internal factors (domestic determinants) and external factors (foreign determinants). Domestic determinants include moderately stable determinants such as the Britain's political culture and political dynamic and then the unstable determinants such as public opinion. The foreign determinants include supportive actions and neutral actions as responses to international situations.

The decision were also influenced by national, international, and humanitarian responsibilities. For these responsibilities, the British must pay attention to the R2P framework as approved by the United Nations for humanitarian intervention. Other than referring to the R2P, the British's success on the intervention was seen in Sierra Leone people who regarded the British as their savior, hence Tony Blair was awarded as a peace pioneer by the Mahera tribe in Sierra Leone.

Keywords: humanitarian intervention, R2P, determinant, international community

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., atas rahmat-Nya telah memberikan kesempatan pada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dan senantiasa memberikan dukungan kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama Bapak Mangadar Situmorang atas saran dan bimbingannya dalam proses pengerjaan skripsi.

Penelitian yang berjudul “Intervensi Kemanusiaan: Faktor-Faktor yang Mendorong Inggris Melakukan *Responsibility to Protect* terkait Perang Saudara di Sierra Leone (1991-2002)” disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun untuk penelitian ini. Sebagai akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan pembaca atas fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional.

Bandung, 8 Agustus 2018

Muhammad Reyhan Raharjo Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pertama-tama saya bersyukur atas rahmat Allah SWT saya berhasil menuntaskan skripsi, juga studi sarjana selama 4 tahun.
2. Terima kasih untuk keluarga, khususnya Ayah, Ibu, Teh Icha, Bara, Nenek, dan Bibi yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun demi keberhasilan saya menuntaskan jenjang pendidikan sarjana. Tak lupa juga terima kasih atas dukungan kerabat-kerabat dari keluarga besar yang mampu memicu penyelesaian skripsi ini.
3. Mas Mangadar, sebagai mentor dalam pembuatan skripsi selama satu semester terakhir. Terima kasih atas waktu dan segala saran yang diberikan di tengah kesibukan sebagai rektor, suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya tujukan untuk Mas Nyoman dan Mas Adri atas evaluasi serta saran yang mampu membuat skripsi ini menjadi lebih baik, begitu juga dengan Mas Bob yang sempat membimbing pada sidang seminar. Semoga orang-orang yang saya kagumi diatas senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam hidup, terima kasih banyak.
4. Teman-teman Roger 69, Fuad 'Al'y Azmi, Aldy 'Bakfoi' Tririfky, Farhan 'Aan' Adipratama, Ari 'Subil' Budi Santosa, Reizka 'Tingtong' Dwidianto, Rizky 'Ikiw' Ramadhan, Ali 'Owi' Tanthowi, Fahrian 'Rusuh' Aryasa, Fahrizal 'Ijal' Ahadisuryo, Revin 'Ulub' Syah, Farhan 'Abas' Hardwin, Egar

‘El Paco’, Frenza ‘Eza’ Adriandi, Djodi, ‘Akang’ Adam Garaudy, dan Alm. Prana Alfarisi yang telah menjadi teman seperjuangan dalam mengarungi kehidupan di universitas sejak ospek sampai akhirnya lulus. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu, uhuy. Terima kasih juga buat penetralisir kelompok huru-hara ini, Berlinda Nefertiti Goldy Salaki dan Febriyanthi Pingkan.

5. Saudara tidak sekandung, Aryo Triutama Wirya dan Aschwin Mufid yang selalu sedia untuk berteman sedari SMP sampai sekarang, semangat untuk kalian yang pasti akan sampai ke tahap ini. Kita bakal sukses parah tapi tetep selalu punya waktu main PS dan ngopi-ngopi cerita tentang *progress* hidup masing-masing.
6. Teman-teman IETF, SOR, Logistik, Mustahkam dan teman-teman lainnya yang punya pemikiran luar biasa dilengkapi kebodohan yang luar biasa juga. Beruntung karena kenal kalian kehidupan kampus jadi gak ngebosenin.
7. Sobat-sobat semenjak SMA sekelas 3 tahun uhuy. Ines, Abay, Amel, Seno, Azhari. Terima kasih atas dukungannya dan apresiasinya hehe.
8. Shasta Kirana yang katanya harusnya Kirana Shasta, *The Big Name on my deep space*, orang paling berjasa dalam perjalanan awal kuliah sampai skripsi ini beres. Terima kasih banyak terutama untuk kesediaannya untuk selalu ada setiap saat. Bahkan “terima kasih banyak” pun gak bakal cukup iya hehe.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Istilah	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kerangka Pemikiran	11
1.4.1 Kajian Terdahulu	11
1.4.2 Kerangka Pemikiran	13
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	24
1.5.1 Metode Penelitian	24
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	25

1.6 Sistematika Pembahasan	25
----------------------------------	----

BAB II DINAMIKA POLITIK, LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN

PERANG SAUDARA DI SIERRA LEONE	27
2.1 Profil Singkat Sierra Leone	28
2.2 Dinamika Politik dan Pemerintahan Sierra Leone	30
2.2.1 Perebutan Kekuasaan antara APC dan SLPP	32
2.2.2 Kegagalan sistem satu partai APC	34
2.2.3 Keterlibatan militer dan kudeta	35
2.2.4 Latar Belakang Pembentukan dan Perkembangan <i>Revolutionary United Front</i> (RUF)	37
2.3 Latar Belakang dan Perkembangan Perang Saudara di Sierra Leone	39
2.3.1 Keterlibatan RUF dan NPFL	39
2.3.2 Kemunculan Pihak Eksternal dalam Perang Saudara di Sierra Leone	42

BAB III DINAMIKA POLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INGGRIS

SEBELUM DAN SAAT MASA KEPEMIMPINAN TONY BLAIR (1990-2007)	52
3.1 Dinamika Politik dan Kebijakan Luar Negeri Inggris Sebelum Masa Jabatan Tony Blair (Sir John Major 1990-1997	53
3.2 Dinamika Politik dan Kebijakan Luar Negeri pada masa jabatan Tony Blair	55
3.2.1 Kebijakan Luar Negeri Tony Blair	60
3.2.2 Doktrin <i>International Community</i>	65

BAB IV DETERMINAN DOMESTIK DAN DETERMINAN INTERNASIONAL

SEBAGAI PENDORONG IMPLEMENTASI R2P OLEH INGGRIS DI	
SIERRA LEONE	75
4.1 Gambaran Latar Belakang Hubungan Inggris dan Sierra Leone	76
4.2 Analisis tiga tradisi <i>English School</i> – Robert Jackson dengan Kebijakan Luar Negeri Inggris	77
4.3 Analisis Faktor Internal dan Eksternal (Determinan Domestik dan Internasional) dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Inggris	82
4.3.1 Faktor Internal (Determinan Domestik)	82
4.3.2 Faktor Eksternal (Determinan Internasional)	87
4.4 Analisis Intervensi Kemanusiaan dengan kerangka <i>Responsibility to Protect</i> (R2P)	89
BAB V KESIMPULAN	99
Daftar Pustaka	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	28
-----------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ACPP	: <i>Africa Conflict Protection Protocol</i>
ACRM	: <i>Anti-Corruption Revolutionary Movement</i>
APC	: <i>All People's Congress</i>
AFRC	: <i>Armed Forces Revolutionary Council</i>
C-5	: <i>Committee of Five</i>
CDF	: <i>Civil Defense Forces</i>
DFID	: <i>Department of International Development</i>
DK PBB	: <i>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
ECOMOG	: <i>Economic Community of West African States Monitoring Group</i>
ECOWAS	: <i>The Economic Community of West African States</i>
EO	: <i>Executive Outcomes</i>
FCO	: <i>Foreign and Commonwealth Office</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ICISS	: <i>International Commission on Intervention and State Sovereignty</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IRA	: <i>Irish Republican Army</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NPFL	: <i>National Patriotic Front of Liberia</i>
NPRC	: <i>National Provisional Ruling Council</i>
NRC	: <i>National Reformation Council</i>
OAU	: <i>Organisation of African Unity</i>

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
R2P : *Responsibility to Protect*
RUF : *Revolutionary United Front*
SLDHS : *Sierra Leone Demographic and Health Survey*
SLPP : *Sierra Leone's People Party*
UNAMSIL : *United Nations Mission in Sierra Leone*
UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*
UNOMSIL : *United Nations Observing Mission in Sierra Leone*

DAFTAR ISTILAH

9/11	: Peristiwa penabrakan gedung kembar World Trade Center oleh teroris
AK-47	: Senjata api
<i>Failed state</i>	: Negara gagal
<i>House of Commons</i>	: Parlemen Inggris
<i>No-fly zone</i>	: Larangan untuk melakukan aktivitas penerbangan
Operasi Palliser	: Nama operasi militer Inggris dalam upaya intervensi di Sierra Leone
Partai Buruh Baru	: Label partai Buruh dalam Pemilu tahun 1997
<i>Responsibility to Protect</i>	: Kerangka kerja dalam melakukan atau melegalkan upaya intervensi
Sobel	: Tentara dibawah umur sekaligus pemberontak milik NPRC
<i>The Just Cause Threshold</i>	: Salah satu prinsip dalam kerangka <i>responsibility to protect</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu isu dalam bidang keamanan kontemporer. Sejak tahun 1990, isu tersebut menjadi topik hangat bagi para peneliti Ilmu Hubungan Internasional. Adapun pengertian ‘intervensi’ sendiri adalah upaya ikut campur yang dilakukan oleh suatu aktor dalam masalah aktor lainnya tanpa persetujuan aktor yang bermasalah tersebut. Sedangkan intervensi kemanusiaan sendiri adalah upaya oleh suatu negara atau perkumpulan negara terhadap suatu masalah di luar lingkup atau teritori mereka tanpa persetujuan sebelumnya dari negara dalam teritori tersebut dengan dasar membela kemanusiaan dalam negara di teritori tersebut atau dengan tujuan merestorasi pemerintahan dari negara tersebut.¹

Berbeda dengan bantuan kemanusiaan, intervensi kemanusiaan biasanya menggunakan kekuatan militer dalam aksinya. Diinisiasi oleh negara atau perkumpulan negara, intervensi kemanusiaan biasanya dijalankan demi membela warga negara dengan melawan pemerintahan dari suatu negara yang tengah dilanda konflik. Sedangkan, bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu antara negara pemberi dan penerima bantuan.

¹ Martin Griffiths, *International Relations: The Key Concepts*, New York: Routledge, 2002, hlm. 145.

Bantuan kemanusiaan juga sangat memperhatikan kedaulatan negara dalam pelaksanaannya. Sedangkan intervensi kemanusiaan, tidak memperhatikan kedaulatan sebuah negara dalam menjalankan misi kemanusiaan.²

Meski dilakukan demi melindungi hak asasi manusia (HAM), intervensi kemanusiaan masih belum jelas kebenarannya. Karena intervensi kemanusiaan tidak menghormati kedaulatan negara, sedangkan dalam Piagam PBB (artikel 2 (4)(7)), kedaulatan negara merupakan dasar dari hukum internasional. Maka bisa dinilai upaya intervensi kemanusiaan mencederai hukum internasional dengan tidak menghormati kedaulatan negara. Namun, dibalik hal tersebut ada hak-hak dari orang-orang yang tidak terpenuhi dengan adanya konflik dalam suatu negara ketika terjadi konflik – dan intervensi kemanusiaan perlu untuk dilakukan demi melindungi HAM – atau bahkan menghentikan konflik yang terjadi dalam suatu negara.³

Kasus intervensi kemanusiaan sebenarnya sudah ada pada tahun 1978 saat Vietnam yang masuk ke Kamboja dan mengakhiri genosida oleh Pol Pot pada saat itu yang telah berkuasa sejak 1975. Lalu, kontroversi mengenai legalitas intervensi kemanusiaan pasca Perang Dingin mulai menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya konflik dan kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia dan beberapa negara di Afrika. Dengan maraknya peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut, mengundag opini publik yang berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa

² Martin Griffiths, *International Relations: The Key Concepts*, New York: Routledge, 2002, hlm. 145.

³ Ibid, hlm 145-146.

Barat yang sangat menjunjung tinggi HAM. Munculnya opini-opini tersebut merupakan dorongan masyarakat agar negara-negara maju penjunjung tinggi HAM seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dapat melakukan sesuatu untuk melindungi HAM di Yugoslavia dan beberapa negara di Afrika yang tengah dilanda konflik internal. Melihat langkah *peacekeeping* tradisional yang kurang efektif, intervensi kemanusiaan muncul sebagai jawaban untuk memecahkan masalah kejahatan kemanusiaan dalam konflik-konflik internal tersebut.⁴

Salah satu intervensi kemanusiaan yang populer adalah ketika *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) melakukan upaya berkelanjutan pertamanya setelah 50 tahun eksistensi mereka. NATO melakukan intervensi kemanusiaan selama 11 minggu di Kosovo demi melawan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Yugoslavia pada tahun 1999. Pergerakan tersebut merupakan upaya NATO dalam mengimplementasikan salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) namun tanpa persetujuan DK PBB terlebih dahulu.⁵ Selain intervensi militer bertajuk “*humanitarian war*” oleh NATO di Kosovo, upaya intervensi lainnya dilakukan oleh Inggris pada tahun 2000 di Sierra Leone.

Negara di Afrika Barat tersebut telah menderita konflik sejak 1991 hingga 2002, perang sipil dimulai ketika kelompok pemberontak bernama *Revolutionary United Front* (RUF) muncul dan melakukan upaya kontrol atas sumber daya mineral

⁴ Martin Griffiths, *Op. Cit.*, hlm. 146.

⁵ Adam Roberts, *NATO's 'Humanitarian War' over Kosovo*, *The International Institute for Strategic Studies*, 1999, hlm. 102.

dan merenggut aset-aset warga sipil. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Sierra Leone seharusnya merespon dengan keras atas apa yang dilakukan oleh RUF. Namun, pada kenyataannya pemerintah tidak mampu melindungi warga negaranya dan melawan RUF – bahkan pemerintah kerap melakukan hal yang sama – seperti kekerasan terhadap warga sipil dan bersekongkol dengan RUF.⁶

Konflik internal di Sierra Leone merupakan konflik yang dipengaruhi oleh pemerintah yang mengabaikan nasib warga negaranya dan membiarkan kubu-kubu dalam masyarakatnya. Selain itu, RUF sebagai kelompok pemberontak yang sangat mengganggu di Sierra Leone didukung oleh pasukan Charles Taylor dari Liberia.⁷

Dengan keadaan konflik yang semakin memburuk, Inggris melakukan operasi Palliser dengan melepas 1300 pasukannya pada bulan Mei 2000 untuk menyelamatkan warga Inggris yang terjebak di Freetown dan mengamankan bandara di pusat kota, tugas militer Inggris melebar dan menjadi pengubah situasi ketika mereka berhasil menyelamatkan dan melindungi pasukan *peacekeeper* dari PBB dari Freetown serta mereka pun berhadapan langsung dengan RUF – sehingga akhirnya RUF menandatangani kesepakatan perdamaian pada 2001 yang merupakan peristiwa penting dalam mengakhiri konflik. Selain disebabkan oleh tekanan dari Inggris, RUF juga mendapatkan tekanan dari Guinea yang ikut menyerang RUF, upaya *United*

⁶ Jonathan Pickering, *Policy Coherence in International Responses to State Failure: The Role of United Kingdom in Sierra Leone*, London: London School of Economics and Political Science, 2009, hlm. 20.

⁷ Ibid, hlm. 21.

Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) yang semakin besar dan melebar, juga RUF telah kehilangan kontrol atas sumber daya mineral unggulan yaitu berlian.⁸

1.2 Identifikasi Masalah

Konflik internal telah menjadi isu yang cukup hangat pasca Perang Dingin. Yugoslavia dan negara-negara Afrika lainnya sempat merasakan bagaimana konflik internal yang memecah belah bangsa mereka sehingga kejahatan kemanusiaan tidak bisa dibendung lagi dan akhirnya upaya intervensi kemanusiaan diperlukan untuk mengakhiri penderitaan dari konflik internal tersebut.

Begitu pula dengan Sierra Leone yang merupakan negara dengan sejumlah masalah sebelum terjadinya konflik internal pada tahun 1991 hingga 2002. Krisis telah dialami sebelumnya oleh Sierra Leone sejak 1970-an dan 1980-an. Sierra Leone merupakan negara dengan berbagai etnis dengan bahasa yang berbeda, dikarenakan berbagai negara Eropa sempat mendatangi Sierra Leone pada abad ke-15. Menganut sistem politik sosial-ekonomi dalam sistem kerajaan yang belakangan ini menjadi sistem utama yang penting. Agama yang mereka anut pertama kali adalah animisme, lalu muncul agama-agama lain seperti Islam yang muncul pada abad ke-13 ke dunia Utara lalu mulai menyebar pada abad ke-17, juga Kristen yang muncul setelah kedatangan bangsa Eropa melalui para penjelajahnya.⁹

⁸ Jonathan Pickering , *Op. Cit.*, hlm. 27

⁹ John Hirsch, *Sierra Leone: Diamonds and the Struggle for Democracy*, Lynne Renner Publishers, 2001, hlm. 22

Penjelajah asal Belanda dan Portugis pertama kali datang ke pelabuhan utama di pusat kota, Freetown – sejak itulah agama Kristen muncul di Sierra Leone. Bangsa Portugis lalu menetap dan menikah dengan bangsa asli Sierra Leone dan membuat suku bangsa baru yaitu Krio, suku dengan campuran Afrika dan Eropa didalamnya. Meski sama-sama bangsa Afrika, populasi suku Krio hanya 2 hingga 3% di Sierra Leone – Krio juga dibenci dan dikucilkan oleh suku bangsa asli di Sierra Leone.¹⁰

Lalu pada abad ke-17 bangsa Inggris datang ke Freetown dengan tujuan membebaskan perbudakan. Setelah seabad lamanya, Inggris berhasil melarang perbudakan juga perdagangan budak. Freetown digunakan sebagai pelabuhan utama bagi para budak, karena biasanya kapal untuk mengirim budak dari Afrika akan melalui Afrika Barat. Budak-budak dari Jamaika dan Nova Scotia akhirnya bisa dibebaskan oleh Inggris di Freetown. Dengan banyaknya bekas budak yang diselamatkan dan dibebaskan di Freetown, maka Freetown menjadi kota dengan penduduk heterogen – dimana terdapat bangsa Eropa, suku Krio, budak-budak yang dibebaskan, juga penduduk asli Freetown.¹¹

Setelah berhasil membebaskan perbudakan dan menjadikan Freetown sebagai tempat baru bagi budak-budak, Inggris menyatakan Freetown sebagai salah satu koloni mereka dan kontrol atas seluruh kota dan sekitarnya menjadi hak mereka. Sementara itu, Krio diberikan andil untuk duduk di pemerintahan karena Krio

¹⁰ John Hirsch, *Sierra Leone: Diamonds and the Struggle for Democracy*, Lynne Renner Publishers, 2001, hlm. 23

¹¹ *Loc. Cit.*

memiliki sedikit genetika Eropa dalam diri mereka. Alhasil, Krio menikmati hidup kelas menengah-keatas dibawah dari bangsa kulit putih Eropa. Posisi di masyarakat seperti dokter, pebisnis, dan guru merupakan posisi yang ditempati oleh suku Krio. Adanya perbedaan kedudukan tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi antara populasi Krio dan lainnya, penduduk asli pun membenci Krio dengan menyebut suku Krio hanya suku yang lebih buruk dibandingkan penduduk asli, meski memiliki nasib sebagai kelas bawah, penduduk asli Freetown merupakan pemilik sejati dari teritorinya. Sedangkan suku Krio, hanya ‘penumpang’ di Freetown – meski Krio pun berkulit hitam, namun memiliki keturunan bangsa Eropa yaitu Portugis.¹²

Pada tahun 1961, Inggris memberikan kemerdekaan Sierra Leone. Kemajuan Freetown semakin berkembang pesat setelah kemerdekaan Sierra Leone, bahkan modernitas bisa dikatakan sudah menyentuh Freetown dan memunculkan anggapan bahwa Sierra Leone bisa menjadi negara pelopor modernitas pada saat itu. Namun, konflik ketimpangan antar ras dan sosial-ekonomi yang ada pada zaman kolonialisme Inggris masih ada. Pemerintah tidak dapat menghilangkan fenomena tersebut. Sehingga semakin lama, isu tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa perang sipil terjadi di Sierra Leone.¹³Duta besar Amerika Serikat untuk Sierra Leone, John Hirsch mengatakan:

¹² John Hirsch, *Sierra Leone: Diamonds and the Struggle for Democracy*, Lynne Renner Publishers, 2001, hlm. 24.

¹³ *Loc. Cit.*

Sierra Leone's history reflects a fundamental paradox: before independence it was, at one level, a remarkable example of peaceful coexistence among peoples of diverse religious beliefs and backgrounds. Fourteen different ethnic groups lived according to Islamic, Christian, and animist traditions. Intermarriage was common and there was little ethnic tension. Yet geographically base ethnic tensions between Mendes in the south and the Temnes and Limbas in the north, manipulated by politicians were to be at the root of the state's progressive collapse in the nearly four decades since independence.¹⁴

Pemerintahan pasca kemerdekaan diduduki oleh suku Krio yang juga mengatur bisnis di Sierra Leone. Ketimpangan yang sebelumnya telah terjadi, diperparah oleh perebutan sumber daya mineral unggulan di Sierra Leone, yaitu berlian. Dengan adanya sumber daya tersebut membuat Sierra Leone menjadi incaran RUF, yang merupakan pasukan pemberontak yang didukung oleh Liberia.¹⁵

Konflik internal yang berkepanjangan di Sierra Leone merupakan masalah utama dan salah satu alasan mengapa Inggris memutuskan untuk melakukan intervensi kemanusiaan dan menjunjung tinggi misi kemanusiaan di Sierra Leone.

¹⁴ John Hirsch, *Op. Cit.*, hlm. 24

¹⁵ *Loc. Cit.*

1.2.1 Pembatasan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah dan identifikasi masalah dalam topik ini, penulis akan membatasi masalah khusus pada upaya intervensi kemanusiaan oleh militer Inggris di Sierra Leone pada tahun 2000. Intervensi tersebut menjadi peristiwa penting dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah lama terjadi di Sierra Leone juga terhadap proses perdamaian di Sierra Leone.

Fokus penelitian dikhususkan pada tahun 2000, karena intervensi yang dilakukan oleh Inggris dapat meredam konflik yang terjadi di Sierra Leone yang disebabkan oleh RUF. Fokus penelitian terdapat pada Sierra Leone yang menjadi sasaran Inggris dalam melakukan intervensi kemanusiaan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, pembahasan dalam perumusan masalah adalah: Apa saja faktor yang mendorong Inggris untuk melakukan intervensi kemanusiaan terkait perang saudara di Sierra Leone?

Faktor yang dimaksud adalah determinan yang mendorong intervensi kemanusiaan oleh Inggris dalam konflik di Sierra Leone pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair dalam kebijakan luar negerinya. Penulis juga akan menganalisis bagaimana faktor tersebut juga mempengaruhi pengambilan keputusan

Inggris untuk berhubungan dengan Sierra Leone. Seperti yang dibahas oleh Howard H. Lentner mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong sikap suatu negara.¹⁶ Selain itu, Penulis menganalisis implementasi *responsibility to protect* dalam upaya intervensi kemanusiaan yang dilakukan Inggris.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Inggris untuk melakukan intervensi kemanusiaan terkait perang saudara di Sierra Leone.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini mampu menambah referensi mengenai intervensi kemanusiaan, khususnya di kawasan Afrika. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna untuk mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan dalam membahas isu intervensi kemanusiaan.

¹⁶ Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Columbus: A Hell Well Company, 1973, hlm. 7.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Terdahulu

Penulis telah meninjau sebanyak satu buah tulisan terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tulisan terdahulu tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Rujukan penelitian yang dipakai penulis adalah sebagai berikut.

Kajian literature yang pertama adalah tulisan berjudul “*Successful intervention? Critical reflections on the legacy of British military intervention in Sierra Leone*” yang ditulis oleh Lucy Scott dalam Jurnal *Peace, Conflict & Development: An interdisciplinary Journal*.¹⁷ Konsep yang dipakai dalam tulisan tersebut adalah konsep warisan (*legacy*). Scott dalam tulisannya tersebut memberikan tanggapan mengenai intervensi humaniter Inggris di Sierra Leone yang dianggap sukses oleh komunitas internasional dan juga memberikan bahasan mengenai dampak “warisan” dari intervensi Inggris tersebut secara domestik dan global. Scott berpendapat bahwa istilah ‘kesuksesan’ tidak dapat diterapkan pada kondisi intervensi karena adanya keterkaitan antara perdamaian dan agenda politik suatu negara. Selain itu, “warisan” yang didapatkan melalui intervensi eksternal pada

¹⁷Lucy Scott, *Successful Intervention? Critical reflections on the legacy of British military intervention in Siera Leone*, *Peace, Conflict & Development: An interdisciplinary Journal*, 2016.
<http://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/>, diakses pada 24 September 2017

konflik internal di suatu negara juga terpengaruh oleh kehadiran perdamaian positif yang didapatkan.

Kajian literatur yang kedua adalah *working paper* berjudul “*Policy Coherence in International Responses to State Failure: The Role of the United Kingdom in Sierra Leone*” yang ditulis oleh Jonathan Pickering.¹⁸ Konsep yang digunakan dalam tulisan tersebut adalah konsep koherensi kebijakan dan kaitannya dalam kegagalan negara. Argumen yang dibawa oleh Pickering adalah tahap awal keterlibatan Inggris di Sierra Leone merupakan tindakan yang tidak koheren meski Inggris telah berupaya untuk menintegrasikan beberapa objektif menjadi suatu strategi persyaratan humaniter.

Hal ini dikarenakan adanya penarikan bantuan kemanusiaan dan gagalnya Inggris dalam mengkompromikan keadilan mengenai pelanggaran HAM. Lalu argumen berikutnya adalah walaupun intervensi Inggris tersebut terlihat tidak disusun secara koheren dan kurangnya kerjasama dengan PBB, mandat akhir yang diberikan adalah melalui kebijakan yang koheren dan akhirnya menghasilkan hasil yang efektif dan paling koheren dalam mendukung tujuan keamanan domestic dan internasional. Lalu, program rekonstruksi yang diberikan Inggris menunjukkan tingkat koherensi yang cukup tinggi antara pembangunan negara dan pembangunan perdamaian.

¹⁸ Jonathan Pickering, *Policy Coherence in International Responses to State Failure: The Role of the United Kingdom in Sierra Leone*, London: London School of Economics and Political Science, 2009

Lalu, kajian literatur ketiga adalah artikel berjudul “*Realist Thought and Humanitarian Intervention*” yang ditulis oleh Daniel Fiott.¹⁹ Artikel ini membahas mengenai asumsi realisme yang memandang nilai kode etik dan politik dari intervensi kemanusiaan merupakan hal yang berlawanan dengan realisme. Dalam tulisannya, Fiott mengatakan bahwa dalam pandangan realis, alasan moral untuk menyelamatkan hak asasi manusia merupakan faktor andalan untuk menekan pemerintahan yang menindas hak-hak dari warganya sebagai kepentingan nasional ataupun kepentingan sistem internasional. Argumen tersebut menjadi faktor tersendiri dalam perkembangan sejarah realis. Tulisan ini menyampaikan bahwa intervensi kemanusiaan tidak selalu berlawanan dengan realisme. Dalam dunia kontemporer ini, realisme juga memperdebatkan intervensi kemanusiaan. Meski realisme sendiri tetap bersikeras bahwa dalam melakukan intervensi militer, suatu negara pasti memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Bukan hanya semata-mata untuk melindungi nilai etik seperti kemanusiaan.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab apa yang telah disebutkan pada perumusan masalah sebelumnya, penulis menggunakan alat bantu analisis berupa kerangka pemikiran guna membantu penulis untuk lebih memahami fenomena yang diteliti. Kerangka pemikiran berupa argumentasi-argumentasi yang kredibel dan dapat

¹⁹ Daniel Fiott, *Realist Thought on Humanitarian Intervention, The International History Review*, New York: Routledge, 2013

dipertanggungjawabkan dapat membantu penulis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara dari pemecahan masalah atas fenomena yang diteliti oleh penulis.²⁰

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan teori *English School* untuk menganalisis faktor pendorong Inggris dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Sierra Leone. *English School* dikemukakan oleh Hedley Bull, Charles Manning, Martin Wight, Adam Watson, dan R. J. Vincent. *English School* sendiri merupakan gabungan dari ‘tiga tradisi’ yaitu realisme, rasionalisme, dan revolusionisme. Ketiganya telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Hobbes, Macchiavelli, Grotius, dan Kant. Dengan adanya kombinasi dari tiga tradisi tersebut, Robert Jackson melihat ketiga tradisi tersebut sebagai alat untuk menjelaskan nilai-nilai yang beragam yang mempengaruhi negara dalam membuat kebijakan luar negeri.²¹

Tradisi realisme yang dikemukakan oleh Niccolo Macchiavelli dan Thomas Hobbes sendiri membicarakan tentang sistem internasional, realisme menempatkan politik dan *power* antar negara serta pengaruhnya terhadap struktur dan proses dalam sistem internasional yang anarki.²²

Lalu, dalam tradisi rasionalisme yang dikemukakan Grotius, menekankan pada masyarakat internasional. Ide pokok dari masyarakat internasional adalah

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008

²¹ Barry Buzan, *An Introduction to the English School of International Relations*, Cambridge: Polity Press, 2014, Hlm. 14

²² Ibid. hlm. 12

seorang individu hidup dalam suatu masyarakat yang membentuk dirinya dan dirinya sendiri membentuk masyarakat tersebut.²³ dalam masyarakat tersebut, bagaimana pemahaman individu terhadap lainnya menjadi determinan penting bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan individu lain atau masyarakat tersebut. Jika seseorang memiliki nilai dan identitas yang sama (seperti agama, bahasa, sistem pemerintahan, norma-norma) maka pemahaman akan nilai dan identitas tersebut tidak hanya membentuk cara berinteraksi antara mereka, namun juga membentuk batasan-batasan tertentu dalam sistem sosial.

Terakhir, tradisi revolusionisme yang dipopulerkan oleh Kant – dimana revolusionisme memandang individu, juga organisasi non-negara, serta populasi global sebagai fokus dalam sistem negara. Revolusionisme sendiri sejalan dengan kosmopolitanisme universal.²⁴

Dalam pendapatnya, Jackson menjelaskan posisi realisme sebagai pemegang peranan dalam tanggung jawab nasional, rasionalisme yang memiliki prioritas terhadap tanggung jawab internasional, lalu revolusionisme sebagai tradisi yang mengutamakan tanggung jawab kemanusiaan.²⁵ Terkait dengan intervensi kemanusiaan, *English School* menjelaskan bahwa dalam sekelompok negara dalam masyarakat internasional terdapat nilai-nilai yang sama seperti nilai-nilai

²³ Barry Buzan, *Op. Cit*, hlm. 12-13

²⁴ *Loc.Cit.*

²⁵ *Loc. Cit.*

kemanusiaan, norma, dan identitas.²⁶ Hal tersebut senada dengan perspektif solidaritas mengenai adanya kekhawatiran yang sama dalam masyarakat internasional. Adanya pendapat tersebut melawan isu mengenai pluralis yang menghormati kedaulatan negara sehingga melawan intervensi.²⁷

Selain menggunakan teori *English School*, penulis juga menggunakan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang terbentuk pada *UN's Millenium Summit* pada tahun 2000 saat Perdana Menteri Kanada mengumumkan pembentukan *International Comission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS). Dari pembentukan ICISS tersebut, lahir pula konsep *responsibility to protect*. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya merupakan salah satu bentuk *responsibility to protect*.²⁸ Namun, jika suatu negara gagal dalam melindungi warga negaranya, atau jika pemerintah melakukan hal sebaliknya, yaitu membahayakan dan meneror warga negaranya, maka prinsip non-intervensi akan tertandingi oleh prinsip *responsibility to protect*. Dalam Majelis Umum PBB pada tahun 2005, PBB telah berkomitmen untuk menerapkan R2P.²⁹ Adapun hal-hal yang dianggap perlu untuk pengimplementasian R2P adalah ketika terjadi kejahatan kemanusiaan seperti genosida, pembantaian etnis, dan pembunuhan massal. Jika hal-hal tersebut terjadi, maka traktat Westphalia yang mengutamakan kedaulatan negara tidak lagi berlaku demi menjaga keamanan

²⁶ Rohan Dhaliwal, *Using English School Theory to Determine Legitimate Humanitarian Intervention*, 2014 e-ir.info, <http://www.e-ir.info/2014/04/24/using-english-school-theory-to-determine-legitimate-humanitarian-intervention/>, diakses pada 10 Oktober 2017

²⁷ *Loc. Cit.*

²⁸ Paul Williams, *Security Studies: an Introduction*, Oxon: Routledge, 2008, hlm. 426.

²⁹ *Loc. Cit.*

kemanusiaan.³⁰ R2P memiliki tiga langkah yaitu *responsibility to prevent*, *responsibility to react*, dan *responsibility to rebuild*.³¹ Pencegahan merupakan salah satu tujuan utama bagi PBB dalam upaya R2P ini. Sekretaris Jenderal PBB juga menggagas upaya *peacekeeping* yang dilakukan oleh PBB bisa menjadi kontribusi besar bagi perdamaian dunia karena mampu mencegah konflik bersenjata yang bisa terjadi. ICISS dan Dewan Keamanan PBB mengemukakan mengenai empat faktor kunci dalam akar dari *responsibility to prevent*:³²

- Politik (berhubungan dengan HAM dan pemerintahan yang baik)
- Ekonomi (berhubungan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan peluang ekonomi)
- Legal (berhubungan dengan peraturan dan hukum)
- Militer (berhubungan dengan pelucutan senjata, reintegrasi dan reformasi sektoral)

Lalu, selanjutnya mengenai *responsibility to react* memiliki beberapa kriteria untuk melegitimasi intervensi kemanusiaan berupa intervensi militer. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

³⁰ Paul Williams, *Security Studies: an Introduction*, Oxon: Routledge, 2008, hlm. 426.

³¹ Ibid, hlm. 427.

³² Ibid, hlm. 428.

1. *The Just Cause Threshold*

Intervensi militer dan perlindungan kemanusiaan merupakan aksi yang tidak sederhana dan membutuhkan alasan-alasan yang serius untuk melakukannya, seperti kekerasan pada kemanusiaan diantaranya:

- a. Kematian dalam skala besar, jumlah kematian besar merupakan hasil dari genosida yang dilakukan oleh negara, atau dilakukan oleh kelompok tertentu dan negara tidak mampu melindungi warga negaranya, atau juga negara sebagai *failed state*, atau;
- b. Pembersihan ras (*ethnic-cleansing*), baik berupa teror, pemerkosaan, dan pengusiran dari wilayahnya sendiri

2. Prinsip-prinsip Antisipasi

- a. Niat yang benar: Dalam melakukan intervensi kemanusiaan harus didasari oleh niat untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, niat untuk melakukan intervensi kemanusiaan tersebut lebih baik jika dilakukan dengan operasi multilateral, juga berdasarkan dukungan regional dan memperhatikan kondisi korban
- b. Pilihan terakhir: Intervensi militer dibenarkan jika opsi-opsi non-militer tidak bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, dengan asumsi jika tidak dilakukan pendekatan berupa intervensi militer permasalahan kemanusiaan akan sulit diselesaikan

- c. Maksud proporsional: intervensi militer yang dilakukan harus sesuai porsinya yaitu, skala dan intensitas intervensi tersebut mesti dilakukan seminim-minimnya hanya demi mencapai tujuan untuk melindungi manusia
 - d. Prospek menjanjikan: Dalam melakukan intervensi militer, harus ada peluang yang lebih antara pilihan untuk melakukan intervensi militer dan tidak melakukan aksi apapun. Tidak boleh ada kemungkinan kerugian dalam melakukan intervensi militer
3. Badan Otoritas
- a. Dewan Keamanan PBB merupakan badan yang paling pantas untuk melakukan dan menentukan intervensi militer harus dilakukan atau tidak.
 - b. Otorisasi Dewan Keamanan merupakan prioritas untuk melakukan intervensi militer. Siapapun yang ingin melakukan intervensi militer harus memiliki izin dari Dewan Keamanan PBB, atau Dewan Keamanan sendiri yang mengangkat isu intervensi militer tersebut, atau Sekretaris Jendral sendiri yang membahasnya sesuai dengan Artikel 99 dari Piagam PBB
 - c. Dewan Keamanan harus merespon dengan segera inisiasi untuk intervensi dengan kondisi adanya skala besar dalam kejahatan kemanusiaan atau pembersihan ras. Namun, kondisi tersebut harus dibuktikan dengan adanya fakta yang sesuai di lapangan
 - d. Lima anggota permanen Dewan Keamanan tidak boleh memakai hak veto, dengan kepentingan negara tersebut tidak terlibat dalam intervensi tersebut,

demi menghalangi implementasi untuk melakukan intervensi militer untuk melindungi kemanusiaan yang membutuhkan dukungan mayoritas

- e. Jika Dewan Keamanan menolak usulan atau tidak merespon dalam waktu yang dibutuhkan, terdapat opsi alternatif yaitu:
 - I. Terdapat konsiderasi dalam Majelis Umum dalam sesi khusus untuk prosedur '*Uniting for Peace*'; dan
 - II. Upaya oleh organisasi regional atau sub-regional sesuai dengan *chapter VIII* dari piagam PBB, namun disertai dengan izin dari Dewan Keamanan
 - f. Dewan Keamanan harus memperhitungkan segala kemungkinan berupa negara yang bersangkutan tidak akan mengesampingkan cara lain dalam memenuhi urgensi dalam intervensi kemanusiaan jika Dewan Keamanan tidak melakukan upaya *responsibility to protect* – dimana hal tersebut akan mencederai kredibilitas PBB
4. Prinsip Operasional
- a. Tujuan yang jelas; mandat yang jelas dan tidak ambigu; dan sesuai dengan fakta.
 - b. Pendekatan militer dengan mitra yang terlibat; keseragaman komando; rantai komunikasi dan rantai komando yang jelas.
 - c. Menerima batasan, peningkatan dan tahapan. Tujuan dari pengaplikasian intervensi militer untuk melindungi populasi, bukan untuk melumpuhkan negara.

- d. Aturan yang cocok dengan konsep operasional yang telah disepakati; dengan tepat; dengan prinsip proporsional; dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional.
- e. Menerima bahwa perlindungan menggunakan intervensi militer bukan prinsip utama.
- f. Kemungkinan koordinasi maksimal dengan organisasi kemanusiaan.³³

Setelah *responsibility to prevent* dan *responsibility to react*, tahapan selanjutnya adalah *responsibility to rebuild* yang merupakan tanggung jawab untuk membangun negara konflik setelah terjadinya kejahatan kemanusiaan, namun pembangunan tersebut bukan merupakan pengembalian kondisi negara tersebut kepada situasi sebelum perang, melainkan membangun kondisi baru yang lebih aman bagi negara tersebut.³⁴ Menurut ICISS, negara pelaku intervensi harus memiliki rencana strategis untuk mengubah kondisi di negara konflik. Dalam rencana strategis tersebut, negara pelaku intervensi harus memperhatikan isu-isu seperti keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, dan pengembangan. Dalam aspek keamanan, ICISS menyatakan bahwa negara pelaku intervensi memiliki tugas untuk melindungi populasi dan turut serta dalam pelucutan senjata dan memindahkan mantan kombatan keluar dari negara konflik, juga bertugas untuk membentuk pasukan bersenjata bagi negara konflik. Dalam aspek keadilan dan rekonsiliasi, negara pelaku intervensi harus membuat sistem yudisial bagi negara konflik, membantu rekonsiliasi juga dengan memastikan

³³ Paul Williams, *Security Studies: an Introduction*, Oxon: Routledge, 2008, hlm. 430-431.

³⁴ Ibid, hlm. 432.

hak-hak legal dari warga yang terpaksa melarikan diri dari rumahnya di daerah konflik. Lalu, selanjutnya negara pelaku intervensi harus membantu perkembangan ekonomi di negara konflik.³⁵

Selain memakai pendekatan *English School* dan konsep *responsibility to protect*, penulis juga akan menggunakan *foreign policy analysis* sebagai alat untuk mengolah masalah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Penulis akan menggunakan *foreign policy analysis* yang dikemukakan oleh Howard H. Lentner, dimana dalam pendapatnya ia memaparkan ada dua determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu, determinan domestik dan determinan internasional. Lentner juga mengatakan permasalahan dalam kebijakan luar negeri adalah mengetahui faktor di dalam negeri dan diantara negara-negara dan situasi yang menjadi ketertarikan bagi negara. Selain itu, Lentner juga membahas faktor yang bisa melanjutkan atau mengubah kebijakan luar negeri.³⁶

Dalam penjelasan Lentner mengenai dua determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, salah satunya ada determinan internasional atau determinan eksternal yang berasal dari luar negeri. Determinan tersebut dapat mempengaruhi sikap yang akan dilakukan oleh negara, tergantung dengan situasi yang menarik bagi negara.³⁷ Negara memiliki kemungkinan untuk melakukan lima sikap yang melibatkan negara lain, yaitu 1) *inaction*, 2) *supportive action*, 3) *oppositional action*,

³⁵ Paul Williams, *Security Studies: an Introduction*, Oxon: Routledge, 2008, hlm. 432..

³⁶ Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Columbus: A Hell Well Company, 1973, hlm. 7.

³⁷ *Ibid*, hlm. 105.

4) *neutral action*, dan 5) *inductive action*. Pertama, *Inaction* merupakan penyekatan oleh suatu aktor dalam situasi yang menarik bagi aktor tersebut, namun terdapat keraguan akan melakukan suatu tindakan apakah akan tindakan tersebut akan tidak berpengaruh apa-apa atau bahkan malah merugikan aktor tersebut. Kedua, *Supportive action* adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara berupa bantuan dalam bentuk apapun demi membantu pihak lain mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, *oppositional action* adalah tindakan berlawanan dari *supportive action*, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menghalangi negara lain mencapai tujuannya. Keempat, *neutral action* merupakan tindakan suatu negara untuk menghentikan tindakan, atau upaya untuk menetralkan situasi, atau menolak untuk melakukan tindakan yang bisa membuat negara lain mencapai tujuannya. Terakhir, *inductive action* merupakan tindakan untuk membuat negara lain melakukan tindakan yang tidak dilakukan oleh negara tersebut.³⁸

Selain determinan internasional, Lentner juga menyebutkan mengenai determinan domestik yaitu determinan yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara melalui atribut, karakteristik, dan proses. Dalam determinan domestik, Lentner mengklasifikasikannya menjadi tiga kategori utama, yaitu 1) *highly stable determinants*, 2) *moderately stable determinants*, dan 3) *unstable determinants*. *Highly stable determinants* merujuk pada determinan yang tidak akan berubah secara spontan, seperti letak dan luas geografis, iklim, populasi, dan sumber daya alam dalam

³⁸ Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Columbus: A Hell Well Company, 1973, hlm. 108-110.

sebuah negara. *Moderately stable determinants* merupakan budaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik yang mampu berubah kestabilannya.

Lentner juga menegaskan dalam kategori ini, kepemimpinan politik merupakan salah satu yang kerap berubah dalam suatu negara yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri. Terakhir, *unstable determinants* merupakan sikap dan pandangan jangka pendek, begitu juga dengan faktor kebetulan yang bisa mengubah situasi secara tiba-tiba.³⁹

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu proses yang cocok dalam memaparkan fenomena sosial dan politik dalam ilmu hubungan internasional yang kompleks, dengan pemaparannya yang rinci, serta penggunaan kata-kata dan gambaran holistik yang dilakukan dalam latar alamiah.⁴⁰

Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi secara holistik dan

³⁹ Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Columbus: A Hell Well Company, hlm. 136-137.

⁴⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Kostakarya, 2004

dengan cara deskriptif dalam bahasa pada suatu konteks alamiah.⁴¹ Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dari metode statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode penelitian kualitatif mampu membantu menjelaskan penelitian terhadap kehidupan masyarakat, tingkah laku, organisasi, individu, sejarah, peristiwa tertentu, dan hubungan sosial yang terjadi.⁴² Dalam proses penelitian ini, penulis akan menjadi pengamat penuh terhadap intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 2000 serta faktor yang mendorong pada kebijakan Inggris tersebut.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan data sekunder. Perolehan data sekunder berasal dari studi literature seperti buku, dokumen resmi, jurnal, dan artikel lainnya yang relevan dengan bahasan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data fisik – buku, jurnal – maupun berbentuk digital yang dapat diakses melalui internet. Kredibilitas dan validitas data yang diperoleh akan melalui proses triangulasi demi pembuktian yang sah.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian dilakukan secara sistematis dengan dibagi menjadi lima bagian. Bab 1 berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² Quinn Patton, *Qualitative Method and Evaluation Method*, London: Sage Publisher, 2002

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Lalu, Bab 2 berisi tentang latar belakang dan profil Sierra Leone sebagai negara, serta latar belakang konflik, juga lini masa konflik disertai dengan berbagai aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Pada Bab 3, dijelaskan mengenai dinamika politik domestik dan kebijakan luar negeri Inggris sebelum masa kepemimpinan Tony Blair hingga masa kepemimpinan Tony Blair, serta doktrin *International Community* yang menjadi ide utama dalam kebijakan luar negeri Inggris dalam masa kepemimpinan Blair.

Pada Bab 4, dijelaskan mengenai upaya Inggris dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Sierra Leone dengan memenuhi kerangka R2P, serta bagaimana faktor-faktor yang ada mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri yang Inggris terapkan terkait konflik yang terjadi di Sierra Leone.

Pada Bab 5, penulis menyimpulkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada dengan menggunakan material yang telah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya.